

**PENGARUH APBD BERBASIS KINERJA DAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Padang)**



Oleh:  
**FITTUR YANI**  
2009/ 94104

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
Wisuda Periode Maret 2013**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGARUH APBD BERBASIS KINERJA DAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Padang)**

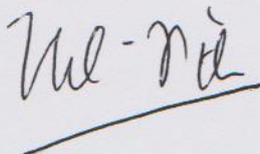
**FITTUR YANI**

**2009/ 94104**

**Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode Maret 2013  
dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.**

**Padang, Januari 2013**

**Pembimbing I**



**Nelvirita, SE, M.Si, Ak**  
**NIP. 19740706 199903 2 002**

**Pembimbing II**



**Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**  
**NIP. 19730213 199903 1 003**

**PENGARUH APBD BERBASIS KINERJA DAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Padang)**

**Fittur Yani**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang

**ABSTRACT**

*This study aims to obtain empirical evidence: (1) The effect of motivation on organizational performance. (2) Effect of the organization's commitment on organizational performance. (3) Effect of participation in budgeting on organizational performance. The population was SKPD in Padang city. The selection of samples used total sampling technique. Data processing technique used multiple regression with SPSS Version 17. The results of this study show that: (1) Motivation has significant positive impact on organizational performance. (2) the commitment of organization does not affect positive significant toward organizational performance. (3) Participation budget preparation has no significant positive effect on organizational performance.*

***Keywords: Motivation, Organizational Commitment, Participation Budgeting, Organizational Performance***

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang: (1) Pengaruh APBD berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. (2) Pengaruh pengawasan APBD terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang. Pemilihan sampel dengan teknik *total sampling*. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) APBD berbasis kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (2) Pengawasan DPRD berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

**Kata kunci : APBD Berbasis Kinerja Dan Pengawasan DPRD Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

## PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (PP Nomor 58 Tahun 2005).

Menurut Mahsun (2006) kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Dalam mengukur sukses atau tidaknya organisasi maka diperlukan indikator kinerja untuk mengetahui apakah suatu organisasi, aktivitas/program telah memenuhi prinsip *value for money* (ekonomis, efisien dan efektif). Pengukuran kinerja *value for money* merupakan bagian terpenting karena merupakan inti pengukuran kinerja di sektor publik.

Berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah, secara umum ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab kinerja instansi pemerintah rendah, diantaranya karena sistem pengelolaan keuangan yang masih lemah dimulai dalam proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan / penata usahaan, pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan dan pengawasan keuangan. Dalam proses penganggaran, pemerintah selalu mengalami keterlambatan dalam pengesahan peraturan tentang keuangan. Keterlambatan ini menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran

berjalan, sehingga menjadi keterlambatan pembangunan.

Halim (2004) secara ringkas mengatakan akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem yang membentuk siklus yang dimulai dari pembentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategik organisasi, yang kemudian dijabarkan secara lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), kemudian ditetapkan dalam penetapan kinerja, penetapan pengukuran kinerja, pengumpulan data untuk penilaian kinerja, menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja, serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa SAKIP merupakan suatu proses yang hidup dan memerlukan peninjauan serta perbaikan terus menerus sehingga tidak berhenti pada satu titik yang disebabkan oleh kondisi organisasi baik internal maupun eksternal yang terus berkembang baik pada masa kini maupun masa mendatang.

Keluaran utama dari SAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini sangat penting untuk digunakan sebagai umpan balik bagi para penyelenggara

pemerintahan. Laporan akuntabilitas kinerja memuat informasi yang relevan bagi para pengguna laporan tersebut yaitu para pejabat atau unsur pimpinan eksekutif pemerintah, unsur pengawasan dan unsur perencanaan. Informasi yang dimaksud tidak hanya bersifat masa lalu (*historical*), akan tetapi juga mencakup status masa kini dan bahkan masa mendatang.

Pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan (Yudoyono, 2003). Selain dari penyusunan APBD oleh DPRD, mekanisme pembahasan anggaran di dewan secara langsung akan mempengaruhi kualitas perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan anggaran itu sendiri dan secara umum akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Abdul, 2004).

Berdasarkan data tahun 2009 rincian daya serap anggaran SKPD di kota Padang yaitu untuk dinas-dinas pelaksanaan fisik mencapai 65,40%, badan-badan 77,42%, kantor-kantor 75,28% dan kecamatan-kecamatan 74,57%. Secara keseluruhan capaiannya masih rendah 25,23% dibandingkan dengan target 99% dari kesepakatan bersama. Hasil laporan di atas menunjukkan SKPD tidak konsisten sejak awal melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga terbebani untuk dapat menyelesaikan seluruh kegiatan dalam anggaran pada waktu relatif singkat tanpa memperhatikan hasil dan manfaat yang akan diperoleh, jadi beberapa SKPD ada yang terlambat dan malah tidak menyampaikan laporan realisasi anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan tanggal 5 setiap bulan (<http://www.google.com>)

Selain kasus yang terjadi di Kota Padang di atas, terdapat beberapa kasus lainnya seperti kasus yang melibatkan tujuh mantan anggota DPRD kabupaten Kudus periode 1999-2004 yang telah melakukan kesalahan dalam hal

penyusunan APBD, pada tahun 2002. Selain itu, di DKI Jakarta, sepanjang November-Desember 2007, tercatat sedikitnya tiga berita besar terkait dinamika otonomi daerah dan pengelolaan keuangan di daerah.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Widia (2008) yang meneliti mengenai pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Sri (2009) yang meneliti tentang pengaruh penyusunan APBD dan pengawasan APBD oleh DPRD terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penulis mengganti variabel penyusunan APBD menjadi APBD berbasis kinerja. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian ini guna mengetahui bagaimana pengaruh APBD berbasis kinerja dan pengawasan APBD oleh DPRD terhadap akuntabilitas kinerja instansi berdasarkan fenomena yang terjadi dan uraian di atas, maka penulis berminat melakukan penelitian di kota Padang dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh APBD Berbasis Kinerja dan Pengawasan APBD oleh DPRD terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Studi Empiris Pada Instansi Pemerintahan Daerah di Kota Padang)”.

## **TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

#### **a. Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah**

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000) yang menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja instansi pemerintah merupakan hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas - tugas yang dibebankan oleh masyarakat kepadanya untuk tujuan bersama. Kinerja dalam suatu instansi pemerintahan merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan instansi pemerintahan yang telah ditetapkan.

Dalam kinerja ada pengukurannya yang disebut dengan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu system yang bertujuan untuk membantu manager publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai pengendalian organisasi.

#### **b. Pengertian Akuntabilitas**

dalam definisi tradisional, Akuntabilitas adalah istilah umum untuk menjelaskan betapa sejumlah organisasi telah memperlihatkan bahwa mereka sudah memenuhi misi yang mereka emban (Guy Benveniste, 1991). Defnisi lain menyebutkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayananan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Teguh Arifiyadi, 2008).

#### **c. Pengertian Akuntabilitas Kinerja**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban hasil kerja seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang

diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya.

#### **d. Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

#### **e. Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Menurut Inpres No. 7/1999, pelaksanaan penyusunan Sistem AKIP dilakukan dengan :

- a. Mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategik
- b. Merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran, dan strategi instansi pemerintah
- c. Merumuskan indikator kinerja instansi pemerintah dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional dan vital bagi pencapaian visi dan misi pemerintah
- d. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan seksama
- e. Mengukur pencapaian kinerja dengan :
  - 1) Perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target
  - 2) Perbandingan kinerja aktual dengan tahun sebelumnya

- 3) Perbandingan kinerja aktual dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.
- f. Melakukan evaluasi kinerja dengan :
  - 1) Menganalisis hasil pengukuran kinerja
  - 2) Menginterpretasikan data yang diperoleh
  - 3) Membuat pembobotan keberhasilan pencapaian program
  - 4) Membandingkan pencapaian program dengan visi dan misi instansi pemerintah

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sistem AKIP di Indonesia setidaknya akan terdiri dari 4 fase utama yakni : (1) penyusunan rencana strategik, (2) pengukuran kinerja, (3) pelaporan kinerja dan (4) evaluasi kinerja.

## 2. APBD Berbasis Kinerja

### Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran dapat dinyatakan sebagai pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai suatu organisasi selama periode tertentu dalam ukuran finansial (Nordawan, 2007). Pengertian ini dapat mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sektor publik. Menurut Bastian (2006), *performance budgeting* (anggaran berbasis kinerja) adalah penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi.

Anggaran berbasis kinerja tersebut merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap perndanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program, diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.

## Langkah-langkah pokok Anggaran Berbasis Kinerja

Agar penerapan anggaran berbasis kinerja berlangsung dengan baik guna meningkatkan kinerja, maka diperlukan langkah-langkah pokok sebagai berikut (Raharto : 2008) :

### 1. Penyusunan Rencana Strategik

Untuk menyusun anggaran berbasis kinerja, kementerian negara / lembaga terlebih dahulu harus mempunyai perencanaan strategik (Renstra). Subtansi Renstra memberikan gambaran tentang kemana organisa harus menuju dan bagaimana cara (strategi) untuk mencapai tujuan itu.

### 2. Sinkronisasi

Merupakan langkah pertama yang sangat penting, yakni sinkronisasi program dan kegiatan / subkegiatan.

### 3. Penyusunan Kerangka Acuan

### 4. Perumusan / Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah bagian penting dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Indikator kinerja merupakan *performance commitment* yang dijadikan dasar atau kriteria penilaian kinerja kementerian negara/lembaga.

### 5. Pengukuran Kinerja / Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan suatu program atau kegiatan/subkegiatan.

### 6. Pelaporan Kinerja

Langkah akhir dari anggaran berbasis kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja yang disusun secara jujur, objektif dan transparan.

## 3. Pengawasan Keuangan Daerah

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskersi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan,

pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui pengoptimalan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi social kemasyarakatan di daerah (*social kontrol*).

Pengawasan oleh DPRD tersebut harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan Arah dan Kebijakan Umum APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan (Penentuan Arah dan Kebijakan Umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan.

“Pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan- aturan dan tujuan yang ditetapkan”.

Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD) dilakukan dengan maksud agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana, aturan dan tujuan yang ditetapkan.

### **Jenis-Jenis Pengawasan APBD**

Pengawasan APBD dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu (Bambang, 2003):

#### 1) Pengawasan Berdasarkan Objek

Pengawasan APBD dapat digolongkan menjadi pengawasan terhadap pendapatan dan pengawasan terhadap pengeluaran daerah. Pengawasan pendapatan daerah lebih ditekankan pada segi pengumpulannya. Sedangkan

tujuan pengawasan pengeluaran meliputi baik segi penyusunan anggarannya, penyalurannya maupun segi pertanggung-jawabannya.

#### 2) Pengawasan menurut sifatnya

Pengawasan APBD dapat dikelompokkan menjadi pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan pada tahap penyusunan APBD. Sedangkan pengawasan detektif dilakukan pada tahap pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBD, yakni dengan membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sungguh-sungguh terjadi.

Tujuan pengawasan preventif terutama untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan APBD. Bentuk- bentuk pengawasan preventif APBD secara terperinci sebagai berikut :

- a) Menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai
- b) Menetapkan strategi dan prioritas program yang hendak dilaksanakan
- c) Menentukan wewenang dan tanggung jawab berbagai instansi sehubungan dengan tugas pokoknya masing- masing
- d) Memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan atau program secara jelas sesuai dengan prinsip-prinsip kehematan, efisiensi dan efektivitas.

#### 3) Pengawasan menurut metodenya

Pengawasan APBD dapat dibedakan menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya, terutama melalui pelembagaan sistem pengawasan pimpinan. Pengawasan fungsional APBD adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yang meliputi BPKP, Itwilprop, Itwilkab/kota.

Jenis-jenis pengawasan APBD di atas menyatakan bahwa pengawasan dilakukan terhadap pendapatan dan pengeluaran daerah dan pengawasan dilakukan dimulai dari proses penyusunan anggaran sampai dengan pertanggungjawaba APBD. Menurut Sopanah (2003) pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan langsung maupun tidak langsung serta *preventif dan represif*. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan serta meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan *preventif* dilakukan melalui *preaudit* yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan *represif* dilakukan melalui *post-audit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi).

### **Kajian Penelitian Sebelumnya**

Penelitian Widia (2008) tentang pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik yang pengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengawasan keuangan daerah, maka semakin tinggi akuntabilitas publik. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat pengawasan keuangan daerah, maka semakin rendah pula tingkat akuntabilitas publik.

Penelitian Alamsyah (1997) dalam Sopanah (2003) tentang pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dan memiliki pengaruh yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi fungsi pengawasan keuangan daerah yang

dilakukan oleh anggota DPRD, maka akuntabilitas kinerja dapat terwujudkan.

Penelitian Sri (2009) tentang pengaruh penyusunan APBD dan pengawasan APBD oleh DPRD terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penyusunan APBD tidak memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengawasan APBD oleh DPRD memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Durachman (2005) melakukan penelitian serupa mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kesehatan di Kota Jambi. Akan tetapi diketahui bahwa komponen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi belum sesuai dengan prioritas program yang tercantum dalam rencana strategis. Selain itu proses penyusunan di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi secara keseluruhan masih bersifat parsial, hal ini tidak sesuai dengan konsep anggaran berbasis kinerja.

### **Hubungan Antar Variabel**

a. Hubungan antara APBD berbasis kinerja dan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

Menurut Mardiasmo (2002) APBD dan APBN yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program- program apa saja yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program- program tersebut dibiayai penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran.

Reformasi anggaran meliputi perubahan struktur anggaran dan perubahan proses APBD berbasis kinerja. APBD dalam era otonomi disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau output

dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan, dan dimaksudkan untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Berdasarkan teori-teori mengenai pengaruh penyusunan APBD terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dapat disimpulkan bahwa semakin baik penyusunan APBD maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan kata lain APBD berbasis kinerja yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga diperoleh hubungan yang positif antara APBD berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga timbul dugaan bahwa APBD berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Hubungan antara pengawasan APBD oleh DPRD dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas publik sesungguhnya berkaitan dengan bagaimana birokrasi publik bukan saja tergantung pada kemampuan birokrasi publik di dalam mendefinisikan dan memanager harapan-harapan publik, tapi juga tergantung pada kemampuan publik dalam melakukan pengawasan atas harapan-harapan yang telah didefinisikan, baik yang dilakukan oleh lembaga pengawasan resmi maupun oleh para politisi dan masyarakat. Karenanya, birokrasi publik dapat dikatakan akuntabel jika dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan publik (La ode, 2004)

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD (Mardiasmo, 2002). Pengawasan keuangan daerah merupakan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan agar terdapat jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktek-praktek KKN baik mulai dari proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban agar terwujudnya

akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran keuangan daerah harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Alamsyah (1997) dalam Sopanah (2003) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan dan (3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tuntutan publik. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widia (2008), didapat hubungan yang positif antara pengawasan APBD oleh DPRD terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana semakin baik pengawasan APBD oleh DPRD maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga timbul dugaan bahwa pengawasan APBD oleh DPRD berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **Kerangka Konseptual**

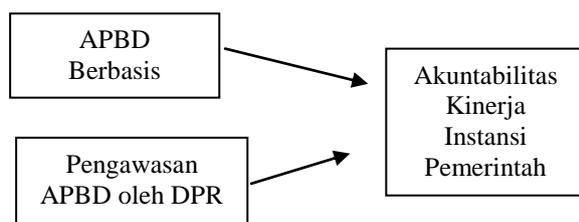
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen, sedangkan anggaran berbasis kinerja sebagai variabel independen. Kerangka konseptual yang dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan.

Suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan atau yang lebih dikenal dengan anggaran berbasis kinerja, akan memperlihatkan adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan atas kegiatan/program yang dilaksanakan. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan

dalam target kinerja pada setiap unit kerja, target kinerja tersebut digunakan untuk mencapai masing-masing tolok ukur kinerja. proses penyusunan anggaran berbasis kinerja tersebut dapat mengidentifikasi tolok ukur kinerja pemerintah daerah yang tepat dan harus dicapai oleh masing-masing program dan berbagai kegiatan program.

Pengawasan terhadap Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa : “ Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

Penelitian ini menguji pengaruh APBD berbasis kinerja dan pengawasan APBD oleh DPRD terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. APBD berbasis kinerja sebagai variable independen ( $X_1$ ) mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengawasan APBD oleh DPRD sebagai variable independen ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hubungan antara mekanisme APBD berbasis kinerja, pengawasan APBD oleh DPRD, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

### Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : APBD berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H<sub>2</sub> : Pengawasan APBD oleh DPRD berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini merupakan penelitian kausatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini data tersebut diperoleh secara langsung dari Kepala SKPD dan Kepala Sub Bagian Penata Usahaan Keuangan pada masing-masing SKPD Kota Padang dengan menggunakan daftar pernyataan dalam bentuk kuisisioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS tahun 2011, pemerintah Kota Padang memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 45 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan Inspektorat.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada Kepala SKPD dan Kepala Sub Bagian Penata Usahaan Keuangan pada masing-masing SKPD. Kuisisioner diberikan secara langsung kepada responden yang ada pada saat penelitian dilakukan. Pengembalian kuisisioner diambil langsung dari responden setelah selesai menjawab item-item pertanyaan dalam kuisisioner yang diberikan.

Variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Terikat (Y)

Variable terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang menjadi perhatian

utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan dapat mendeteksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahan yang terjadi kemudian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

## 2. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (*independen variable*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat (*dependent variable*) dan mempunyai pengaruh positif ataupun negative bagi variabel terikat nantinya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Anggaran berbasis kinerja (X1), Pengawasan APBD oleh DPRD (X2)

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Angket digunakan untuk memperoleh data mengenai penerapan partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik, evaluasi anggaran dan kesulitan tujuan anggaran di SKPD pemerintah Kota Padang. Pengisian angket ini dilakukan oleh aparat pemerintah pada SKPD kota Padang yaitu aparat eselon II, eselon III dan eselon IV. angket disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah diterapkan. Indikator yang digunakan untuk menentukan variabel bebas (X) diambil dari beberapa pendapat para ahli seperti yang terdapat pada kajian teoritis.

### 1. Uji Validitas

Uji validitas ini menggambarkan bahwa pertanyaan yang digunakan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (valid). Untuk uji validitas ini digunakan rumus *Product Moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{\{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2\}\{n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2\}}}$$

Keterangan :

- $r_{xy}$  = koefisien korelasi
- $n$  = besar sampel
- $x$  = variabel bebas ( $x_1, x_2$ )

$y$  = akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item - Total Correlation*. Jika nilai  $r$  hitung kecil dari  $r$  tabel, maka nomor item tersebut tidak valid, sebaliknya jika nilai  $r$  hitung besar dari  $r$  tabel maka item tersebut dinyatakan valid, maka item yang memiliki nilai  $r$  hitung yang paling kecil dikeluarkan dari analisis, kemudian dilakukan analisis yang sama sampai semua item dinyatakan valid. Uji instrument (pilot test) terhadap 30 orang mahasiswa semester 6 FE UNP Progran Studi Akuntansi yang memiliki konsentrasi akuntansi sektor publik.

### 2. Uji reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas, selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas, yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Instrumen dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu – ke waktu. Untuk uji reliabilitas digunakan rumus *Cronbach's Alpha*.

$$r_{11} = \left| \frac{n}{n-1} \right| \cdot \left| 1 - \frac{\Sigma \sigma^2 \tau}{\sigma^2 \tau} \right|$$

Keterangan :

- $r$  = Tingkat Reliabilitas Instrumen
- $n$  = Banyak Butir Pertanyaan
- $\Sigma \sigma^2 \tau$  = Jumlah Varian Butir
- $\sigma^2 \tau$  = Varian Total

Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum reliabilitas kurang dari 0,60 dianggap buruk, dalam kisaran 0,70 dianggap bisa diterima, reliabilitas lebih dari 0,80 dianggap baik.

### Hasil Uji Instrument

Hasil pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa kuat butir-butir fariabel yang ada pada penelitain ini. Uji coba instrument dilakukan pada 30 orang

mahasiswa semester 6 FE UNP Program Studi Akuntansi yang memiliki konsentrasi akuntansnis sektor publik.

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika  $r_{hitung}$  besar dari  $r_{tabel}$  maka dapat dikatakan valid. Dimana  $r_{tabel}$  untuk  $n = 30$  adalah 0,3061. Berdasarkan hasil pengolahan data didapat nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing variable X1, X2 dan Y semuanya di atas  $r_{tabel}$ . Jadi dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan variable X1, X2 dan Y adalah valid.

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model regresi berganda, karena model regresi yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik. Terdapat tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh model regresi agar para meter astimasi tidak bias yaitu:

#### 1. Uji normalitas

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui metode statistic yang digunakan. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test* dengan melihat tingkat signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini adalah dengan melihat *probability asymp. Sig (2 – tailed)*. Jika *probability asymp. Sig (2 – tailed) > 0,05* maka data mempunyai distribusi yang normal.

#### 2. Uji Heterokedastisitas

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat menggunakan uji *Gletser*. Dalam uji

ini, apabila hasilnya  $\text{sig} > 0,05$  maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

### 3. Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel- variabel bebas antara satu dengan yang lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflating Factor*)  $< 10$  dan *tolerance*.  $> 0,10$ .

### Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya di analisis dengan langkah- langkah sebagai berikut :

#### 1. Analisis Deskriptif

##### a. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang diisi oleh responden untuk memastikan apakah semuanya sudah dijawab dengan lengkap oleh responden.

##### b. Menghitung nilai jawaban

- 1) Menghitung frekuensi jawaban yang diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan
- 2) Menghitung rata – rata skor nilai total item dengan menggunakan

$$\text{rumus : } \frac{5SS+4S+3KS+2TS+1STS}{15}$$

Dimana :

SS = Sangat Setuju,

S = Setuju (S),

KS = Kurang Setuju

TS = Tidak Setuju

STS= Sangat Tidak Setuju

- 3) Menghitung nilai rerata jawaban responden

- 4) Menghitung nilai TCR mesing- masing kategori jawaban dari dekriptif variabel dengan rumus :

$$\text{TCR} = R_s \frac{\quad}{n} \times 100$$

Keterangan :

TCR : Tingkat Capaian Responden

- Rs : Rata-Rata skor jawaban Responden (Rerata)  
 n : Nilai skor jawaban  
 Nilai persentase dimasukkan sebagai berikut :
- (a) Interval jawaban responden 76 – 100% kategori jawabannya baik
  - (b) Interval jawaban responden 56 - 75% kategori jawabannya cukup baik
  - (c) Interval jawaban responden <56% kategori jawabannya kurang baik

n = jumlah sampel

### c. Uji Hipotesis (t-test)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah secara terpisah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik, dengan rumus :

$$t = \frac{\beta n}{s\beta n}$$

Keterangan :

t = Nilai mutlak pengujian

$\beta n$  = koefisien regresi masing – masing variabel

$s\beta n$  = standar error masing – masing variabel

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $\alpha < 0,05$ , maka  $H_1$  diterima, dan tolak  $H_0$

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $\alpha > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, dan tolak  $H_1$

Dengan tingkat kepercayaan ( $\alpha$ ) untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau ( $\alpha$ ) = 0,05

### Defenisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka perlu menjelaskan defenisi operasional variabel sebagai berikut :

#### 1. APBD berbasis kinerja

Anggaran berbasis kinerja adalah penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi.

#### 2. Pengawasan APBD oleh DPRD

Pengawasan APBD oleh DPRD tersebut harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Dalam penelitian ini pengukuran pengawasan APBD oleh DPRD pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Padang akan dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner dengan pengukuran skala likert 5 alternatif jawaban

### Metode Analisis

#### a. Analisis Regresi Berganda

Alat regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut ;

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

a = konstanta

$b_{1,2}$  = koefisien regresi dari variabel independen

$X_1$  = APBD berbasis kinerja

$X_2$  = Pengawasan APBD oleh DPRD

e = epsilon (variabel-variabel independen yang tidak diukur dalam penelitian yang mempunyai pengaruh terhadap variabel lain.

#### b. Uji F (F-Test)

Uji F ini dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik untuk menguji apakah model yang digunakan telah fix atau tidak. Rumus yang digunakan adalah:

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Keterangan :

F = uji F

$R^2$  = koefisien determinan

k = jumlah variabel bebas

3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung-jawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner dengan pengukuran skala likert 5 alternatif jawaban.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jumlah populasi sasaran atau sampel pada penelitian ini adalah empat puluh lima satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang yang terdiri dari Dinas, Kantor, Badan, RSUD, Kecamatan dan Inspektorat Daerah. Peneliti menjadikan seluruh populasi sebagai sampel (*total sampling*) karena jumlahnya tidak melebihi 100 subjek. Setiap sampel masing-masing terdiri dari dua responden yaitu Kepala SKPD dan Kepala Sub Bagian Penata Usahaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari empat puluh lima sampel tersebut ada satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menolak untuk menerima kuesioner yaitu Dinas Pendidikan sehingga sampel menjadi empat puluh empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), jadi kuesioner yang disebar sebanyak 88 kuesioner.

Hingga batas akhir pengumpulan data, kuesioner yang diterima kembali sebanyak 82 kuesioner, karena tiga SKPD tidak mengembalikan kuesioner yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Pemuda dan Olahraga, Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Rentang waktu penyebaran dan pengumpulan kuesioner adalah tanggal 24 Mei – 14 Juni 2012.

### A. Demografi Responden

Dari hasil penelitian dapat diketahui karakteristik responden Kepala SKPD dan Kepala Sub Bagian Penata Usahaan Keuangan yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kota Padang yang dijadikan sampel penelitian ini. Berdasarkan data yang diisi oleh responden pada kuesioner penelitian, diketahui karakteristik responden disajikan secara umum menurut jenis kelamin, latarbelakang pendidikan dan lama bekerja.

#### 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Proporsi pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin ternyata didominasi oleh laki-laki dilihat dari kuesioner yang diisi oleh 48 orang atau 58,54 % dan selebihnya diisi oleh perempuan.

#### 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Latarbelakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan responden yang terbanyak adalah Strata 2 (S2) dengan persentase sebesar 59,76% atau sebanyak 49 orang. Selanjutnya pada tingkat Strata 1 (S1) sebanyak 30 orang dengan persentase sebesar 36,59 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada umumnya Kepala SKPD dan Kepala Sub Bagian Penata Usahaan Keuangan yang bekerja di Instansi Pemerintah Daerah Kota Padang yang menjadi responden berpendidikan paling banyak pada Strata 2 (S2).

#### 3. Karakteristik Berdasarkan Lama Bekerja

Tingkat lama bekerja responden yang terbanyak adalah 5-10 tahun dengan persentase sebesar 37,80 % atau 31 orang. Selanjutnya pada tingkat < 5 tahun sebanyak 29 orang atau 35,37 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada umumnya Kepala SKPD dan Kepala Sub Bagian Penata Usahaan Keuangan yang bekerja di Instansi Pemerintah Kota Padang paling banyak telah bekerja 5-10 tahun.

### Uji Validitas dan Reliabilitas

#### 1. Uji Reliabilitas

Untuk  $N = 105$  didapat  $r_{tabel} = 0,161$ . Nilai reliabilitasnya dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing instrument yang dikatakan valid lebih besar dari 0,60.

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's alpha* yang terdapat pada Tabel diatas yaitu untuk instrumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 0,846, untuk instrument APBD Berbasis Kinerja 0,881 dan untuk instrument Pengawasan DPRD 0,506. Dengan demikian semua instrument penelitian dapat dikatakan reliabel.

## 2. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing masing item kuesioner, digunakan *Corrected item-Total Colleration*. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka data dikatakan valid, dimana  $r_{tabel}$  untuk  $N=82$  adalah 0,182. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan nilai *Corrected item-Total Colleration* untuk masing-masing item variabel Y,  $X_1$ , dan  $X_2$  semuanya diatas  $r_{tabel}$ . Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel Y,  $X_1$  dan  $X_2$  adalah valid.

Nilai terkecil dari *Corrected item-Total Colleration* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrument Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diketahui nilai *Corrected item-Total Colleration* terkecil 0,369, untuk instrumen APBD Berbasis Kinerja nilai *Corrected item-Total Colleration terkecil* 0,395, dan untuk instrumen Pengawasan DPRD nilai *Corrected item-Total Colleration* terkecil 0,485.

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas menunjukkan level signifikan lebih besar dari  $\alpha$  ( $\alpha = 0,05$ ) yaitu  $0,438 > 0,05$  yang berarti bahwa data terdistribusi secara normal.

### 2. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji tidak adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai

*Variance Inflation Factor* (VIF)  $< 10$  dan *tolerance*  $> 0,10$ . Variabel APBD Berbasis Kinerja ( $X_1$ ) dengan nilai VIF 2,700 *Tolerance* 0,370. Variabel Pengawasan DPRD ( $X_2$ ) dengan nilai VIF 2,700 dan *Tolerance* 0,370. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lainnya, atau variabel independent pada penelitian ini bebas multikol karena nilai VIF  $<$  dari 10, dan nilai *tolerance*  $>$  0,1.

### 3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual atas pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya gejala heterokedastisitas dilakukan dengan uji *gletser*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya  $\text{sig} > 0,05$  atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Variabel APBD Berbasis Kinerja ( $X_1$ ) dengan nilai  $\alpha$  sebesar 0,582 dan variabel Pengawasan DPRD ( $X_2$ ) dengan nilai  $\alpha$  sebesar 0,862. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas karena nilai  $\alpha > 0,05$ .

## Analisis Model

### 1. Uji Koefisien Determinasi yang

disesuaikan (*Adjusted R Square*)

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat atau mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Dari tampilan *output SPSS model summary* pada Tabel 17 di atas besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,579. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel APBD Berbasis Kinerja dan Pengawasan DPRD adalah sebesar 57,90%, sedangkan 42,10% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

### 2. Analisis Regresi Berganda

Untuk mengungkap pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi berganda. Model ini digunakan terdiri dari dua variabel bebas yaitu APBD Berbasis Kinerja ( $X_1$ ), Pengawasan DPRD ( $X_2$ ) dan satu variabel terikat yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( $Y$ ).

Dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 4,841 + 0,231 X_1 + 0,357 X_2 + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar 4,841 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu APBD berbasis kinerja dan pengawasan DPRD adalah nol maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebesar konstanta 4,841.
- b. Koefisien APBD berbasis kinerja sebesar 0,231 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan APBD berbasis kinerja satu satuan akan mengakibatkan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,231 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
- c. Koefisien pengawasan DPRD sebesar 0,357 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pengawasan DPRD, maka akan mengakibatkan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,342 dengan asumsi variabel lain konstan.

#### 1. Uji F (*F-Test*)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak.

Dari hasil pemrosesan data, dapat dilihat bahwa  $F_{hitung}$  yaitu 56,586 dengan nilai signifikansi yaitu  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent (APBD berbasis kinerja dan pengawasan DPRD) secara bersama-sama

(simultan) mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah)

#### Uji Hipotesis (*t-test*)

Uji t statistik (*t-Test*) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$ . Nilai  $t_{tabel}$  dengan  $\alpha = 0,05$  dan derajat bebas (db) =  $n - k - 1 = 82 - 2 - 1 = 79$  adalah 1,6643. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 20, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini :

##### a. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ . Hipotesis diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai  $sig < \alpha 0,05$ . Nilai  $t_{tabel}$  pada  $\alpha 0,05$  adalah 1,6643. Untuk variabel APBD berbasis kinerja ( $X_1$ ) nilai  $t_{hitung}$  adalah 2,552 dan nilai sig adalah 0,013. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,552 > 1,6643$  atau nilai signifikansi  $0,013 < \alpha 0,05$ . Nilai koefisien  $\beta$  dari variabel  $X_1$  bernilai positif yaitu 0,231. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan bahwa APBD berbasis kinerja ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga hipotesis pertama dari penelitian ini diterima.

##### b. Pengujian Hipotesis 2

Untuk variabel Pengawasan DPRD ( $X_2$ ) nilai  $t_{hitung}$  adalah 4,260 dan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $4,260 > 1,6643$  atau nilai signifikansi  $0,000 \leq \alpha 0,05$ . Nilai koefisien  $\beta$  dari variabel  $X_2$  bernilai positif yaitu 0,357. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa pengawasan DPRD ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah, sehingga hipotesis kedua dari penelitian ini diterima.

## **Pembahasan**

### **1. Pengaruh APBD Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Urip (2009), salah satu prinsip anggaran berbasis kinerja adalah menciptakan akuntabilitas kinerja artinya semakin baik pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang dilaksanakan maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Durachman (2005), dari hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan APBD Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Semakin baik penerapan APBD Berbasis kinerja yang dilaksanakan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan semakin baik.

Dilihat dari data distribusi frekuensi, nilai TCR yang paling tinggi adalah pada item 7 dengan pernyataan koordinasi penanggungjawab program dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai TCR sebesar 88,29%. Sedangkan nilai TCR terendah adalah pada item no 9 dengan pernyataan hasil akhir dari pelaksanaan akan diawasi dan dievaluasi secara berkala, ini berarti setiap kegiatan yang dilakukan SKPD evaluasi. Hal ini ditunjukkan dengan TCR sebesar 82,68%. Secara garis besar APBD berbasis kinerja pada SKPD Kota Padang sudah memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan rerata TCR yang sangat baik yaitu sebesar 84,83%.

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat dinyatakan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Apabila anggaran berbasis kinerja dapat diterapkan dengan optimal dan baik maka akuntabilitas pemerintah daerah dalam

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin baik.

### **2. Pengaruh Pengawasan DPRD Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Mardiasmo (2002) bahwa pengawasan merupakan pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap eksekutif agar terdapat jaminan pola pengelolaan keuangan daerah agar terwujud akuntabilitas publik.

Penelitian sejalan dilakukan oleh Sri (2009), dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh DPRD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Apabila pengawasan DPRD baik maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dilihat dari data distribusi frekuensi, nilai TCR yang paling tinggi adalah pada item 1 dan 15 dengan pernyataan DPRD terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD serta pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD kepada DPRD paling lambat akhir juli yang bersangkutan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai TCR sebesar 85,61%. Sedangkan nilai TCR terendah adalah pada item no 11 dengan pernyataan pengesahan APBD sudah memenuhi norma dan prinsip-prinsip anggaran dengan TCR sebesar 80,24%. Secara garis besar pengawasan DPRD Kota Padang sudah memuaskan. Hal ini ditunjukkan nilai rerata TCR 83,86 %.

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat dinyatakan bahwa pengawasan DPRD berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Apabila pengawasan APBD dapat diterapkan dengan baik maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan semakin baik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengaruh APBD berbasis kinerja dan pengawasan DPRD terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. APBD berbasis kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Pengawasan DPRD berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

### **A. Keterbatasan Penelitian**

Meskipun penelitian ini telah selesai dilaksanakan tetapi penelitian ini memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data yang dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan.
2. Dikarenakan ada SKPD yang memiliki kendala dalam prosedur perizinan dan pengisian kuesioner, menyebabkan data yang diolah kurang optimal.
3. Pilihan jawaban yang peneliti ajukan tidak mewakili semua aspirasi dari responden sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Untuk penelitian selanjutnya, dapat lebih baik jika, dilengkapi dengan wawancara ataupun pernyataan tertulis sehingga dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan penelitian.
2. Untuk meningkatkan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebaiknya DPRD aktif melakukan evaluasi

terhadap laporan triwulan / bulanan yang dibuat pemerintah daerah

3. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebaiknya DPRD terlibat dalam memberikan masukan tentang arah dan kebijakan umum DPRD.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Cici Kumala Sari. 2008. *Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajer Dengan Struktur Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi*. Skripsi. UNP. Padang

Departemen Dalam Negeri. 2007. *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29/2003 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan*.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Husen, La Ode. 2004. *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pengawas Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: CV Utomo.

Johan, Arifin. 2006. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transportasi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi.

Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- Mahsun, Firma S dan Heribertus.2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Ed 1. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munawar. 2006. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Prilaku Sikap Kinerja Manajerial*. Skripsi: Universitas Bung Hatta Padang.
- Pengaturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Anggaran.
- Raharto, Iman.2008. Anggaran Berbasis Kinerja (Pelaksanaan Masalah dan Solusi di Indonesia). *Makalah*. Universitas Negeri Makasar
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penimbangan Keuangan Daerah*.
- Sapaoral. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transportasi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. SNA VI.
- Sri Rahma Yanti. 2009. *Pengaruh Penyusunan APBD dan Pengawasan APBD Oleh DPRD Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Skripsi UNP Padang.
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Widia Eka Putri. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik*. Skripsi. UNP Padang.
- Widjayaa. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yodoyono, Bambang. 2003. *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

## LAMPIRAN

### Pengujian Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		82
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.46422965
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.048
	Negative	-.096
Kolmogorov-Smirnov Z		.868
Asymp. Sig. (2-tailed)		.438

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

#### 2. Uji Multikolinearitas

**Coefficients(a)**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1_ABK	.370	2.700
	X2_PD	.370	2.700

Variable: Y\_AK

a. Dependent

#### 3. Uji Heterokedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.568	2.322		-.245	.807
	X1_ABK	.030	.054	.101	.553	.582
	X2_PD	.009	.050	.032	.174	.862

a. Dependent Variable: absud

## UJI REGRESI BERGANDA

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.841	3.930		1.232	.222
	X1_ABK	.231	.091	.303	2.552	.013
	X2_PD	.357	.084	.505	4.260	.000

a. Dependent Variable: Y\_AK

## UJI F

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	704.621	2	352.311	56.586	.000 <sup>a</sup>
	Residual	491.867	79	6.226		
	Total	1196.488	81			

a. Predictors: (Constant), X2\_PD, X1\_ABK

b. Dependent Variable: Y\_AK

## KOEFISIEN DETERMINASI

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.767 <sup>a</sup>	.589	.579	2.495

a. Predictors: (Constant), X2\_PD, X1\_ABK